



## Peran Strategis *Non-Governmental Organization* (NGO) dalam Krisis Pengungsi Vietnam Tahun 1979-1996 di Pulau Galang, Indonesia

Cosmas Eko Suharyanto<sup>1\*</sup>, Suali<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, Indonesia

[costmust@gmail.com](mailto:costmust@gmail.com)<sup>1</sup>, [sualigilbertus@gmail.com](mailto:sualigilbertus@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [costmust@gmail.com](mailto:costmust@gmail.com)

**Abstract.** *This study analyzes the strategic role of non-governmental organizations (NGOs) in managing Indochinese refugees namely from Vietnam, Cambodia, and Laos on Galang Island during the period 1979–1996. The “boat people” crisis at that time required a multisectoral response that was not only emergency-based but also sustainable, linking Indonesia’s transit policies with applicable international protection standards. Using a literature review method of international journal articles and program technical documents, this study finds that NGOs performed crucial functions beyond mere logistical assistance, particularly through structured educational planning such as the Overseas Refugee Training Program (ORTP). Recent literature indicates that NGO consortia such as SCF and EIL, along with faith-based organizations such as JRS, YCK, and ICMC, played a significant role in fostering refugee self-reliance through cultural orientation curricula and work simulation programs (Work Orientation). Despite various structural challenges and resource limitations, the experience on Galang Island demonstrates the effectiveness of partnerships between NGOs and the government in supporting adaptive and sustainable regional humanitarian diplomacy.*

**Keywords:** *Boat People; Camp Galang Island; JRS; Vietnamese Refugees; YCK.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis peran strategis Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dalam pengelolaan pengungsi Indochina, yaitu Vietnam, Kamboja, dan Laos, di Pulau Galang pada periode 1979–1996. Krisis “manusia perahu” yang terjadi pada masa tersebut menuntut respons multisektoral yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berkelanjutan, dengan menghubungkan kebijakan transit Indonesia dengan standar perlindungan internasional yang berlaku. Menggunakan metode studi literatur terhadap jurnal internasional serta dokumen teknis program, penelitian ini menemukan bahwa NGO menjalankan fungsi krusial yang melampaui bantuan logistik semata, yakni melalui perencanaan pendidikan yang terstruktur seperti *Overseas Refugee Training Program* (ORTP). Literatur terbaru menunjukkan bahwa konsorsium NGO seperti SCF dan EIL serta lembaga berbasis agama seperti JRS, YCK, dan ICMC berperan signifikan dalam membangun kemandirian pengungsi melalui kurikulum orientasi budaya dan simulasi kerja (*Work Orientation*). Meskipun diwarnai berbagai tantangan struktural dan keterbatasan sumber daya, pengalaman di Pulau Galang membuktikan efektivitas kemitraan antara NGO dan pemerintah dalam mendukung diplomasi kemanusiaan regional yang adaptif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** JRS; Kamp Pulau Galang; Manusia Perahu; Pengungsi Vietnam; YCK.

### 1. LATAR BELAKANG

Perang Vietnam (1955–1975) merupakan puncak dari ketegangan panjang yang berakar pada perlawanan terhadap kolonialisme Prancis di Indochina. Setelah Perang Dunia II, gerakan nasionalis Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan, namun Prancis berusaha mempertahankan kekuasaan kolonialnya, memicu Perang Indochina Pertama (Kompas, 2022; Purdey, 2020). Kemenangan Viet Minh di Dien Bien Phu pada Mei 1954 mengakhiri dominasi Prancis dan mengarah pada Perjanjian Jenewa yang membagi Vietnam menjadi dua wilayah di sepanjang Paralel ke-17; Vietnam Utara yang berhaluan komunis dan Vietnam Selatan yang didukung oleh kekuatan Barat (Jenkins, 2014; Słowiak, 2017).

Pada periode tersebut, terjadi gerakan populasi besar-besaran yang dikenal sebagai *Operation Passage to Freedom*. Sekitar satu juta orang berpindah dari Vietnam Utara yang dikuasai komunis ke Vietnam Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 800.000 orang atau 80% adalah penganut Katolik (Duc, 2025).

Pembagian ini awalnya dimaksudkan sebagai solusi sementara menjelang pemilihan umum nasional, namun realitas Perang Dingin mengubahnya menjadi pemisahan yang akan menjadi tragedi kemanusiaan mematikan pada periode modern (Corfield, 2008).

Kejatuhan Saigon pada 30 April 1975 menandai berakhirnya perang secara resmi dan dimulainya periode unifikasi di bawah rezim komunis (Corfield, 2008; Kompas, 2022; Jenkins, 2014). Bagi penduduk Vietnam Selatan, terutama mereka yang pernah bekerja untuk pemerintah lama atau militer AS, kemenangan Utara membawa ketakutan akan pembalasan dendam dan penganiayaan. Rezim baru menerapkan kebijakan "re-edukasi" yang melibatkan indoktrinasi paksa di kamp-kamp terpencil, penyitaan aset pribadi, dan kontrol ketat terhadap kebebasan beragama (Le, 1994; Nguyen, 1992). Marxisme-Leninisme yang menjadi ideologi negara memandang agama sebagai institusi yang berpotensi subversif, terutama Katolik yang memiliki hubungan hirarkis kepada Vatikan di Roma. Hal ini menciptakan ketegangan permanen antara negara dan gereja (Duc, 2025; Jenkins, 2014).

Eksodus massal penduduk Vietnam atau fenomena "manusia perahu" merupakan konsekuensi geopolitik pasca jatuhnya Saigon. Indonesia, meski bukan penandatangan Konvensi 1951, mengambil peran sebagai negara transit strategis dengan menetapkan Pulau Galang sebagai pusat pemrosesan melalui Keppres No. 38 Tahun 1979 (Fandik, 2013; Presiden Republik Indonesia, 1979).

Keterlibatan NGO di Pulau Galang tidak terjadi secara instan, melainkan dimulai dari fase penilaian darurat di pulau-pulau luar seperti Jemaja, Letung, Kuku, pada Juli 1979. Krisis ini memaksa pembentukan kemitraan antara pemerintah Indonesia melalui Panitia Pengelolaan Pengungsi Vietnam (P3V), UNHCR, dan konsorsium NGO internasional dan NGO lokal untuk mengisi celah layanan publik dan pendidikan yang tidak dapat disediakan secara mandiri oleh otoritas militer (Center for Applied Linguistics, 1987; Cribb et al., 2022; Farhanditya, 2024).

Tantangan kemanusiaan ini semakin diperumit oleh kekosongan kerangka hukum di Indonesia terkait penanganan pengungsi. Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia berada pada posisi dilematis; penanganan pengungsi dilakukan melalui kebijakan "toleransi" pragmatis yang memprioritaskan kedaulatan nasional daripada integrasi hukum secara permanen (Putri, 2021). Keberadaan Pulau Galang yang terisolasi secara geografis dipilih secara sengaja untuk meminimalisir interaksi sosial dengan penduduk

lokal, sehingga menciptakan sebuah ruang liminal yang sangat membutuhkan kehadiran aktor non-negara untuk menjalankan fungsi perlindungan harian (Cribb et al., 2022; Rizka & Prabaningtyas, 2019).

Keterlibatan berbagai NGO, baik sekuler maupun berbasis agama, memberikan energi yang strategis. Organisasi seperti *Jesuit Refugee Service (JRS)*, yang didirikan pada tahun 1980 sebagai respon langsung pengungsi Vietnam, bekerja berdampingan dengan konsorsium internasional lainnya (SCF, EIL) untuk memastikan penanganan pengungsi secara komprehensif. Demikian juga organisasi lokal seperti Yayasan Cipta Karya (YCK) milik Keuskupan Pangkalpinang, sangat membantu gelombang pertama pengungsi tahun 1975, ketika pemerintah dan PBB belum mengambil alih penanganan (Hoedemaekers, 1979; Rizka & Prabaningtyas, 2019).

Dengan berbagai latar belakang di atas, peneliti berfokus pada bagaimana NGO mengisi celah layanan pendidikan intensif dan pemeliharaan identitas budaya yang menjadi sangat relevan untuk memahami keberhasilan proses pemukiman kembali (*resettlement*) bagi ribuan individu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran strategis NGO sebagai katalisator stabilitas kemanusiaan di Pulau Galang, yang memberikan standar referensi berharga bagi tata kelola pengungsi di Asia Tenggara.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Dalam sistem kemanusiaan global, NGO merupakan aktor non-pemerintah yang beroperasi berdasarkan prinsip kemandirian dan akuntabilitas kepada penerima manfaat. PBB adalah pihak pertama yang mempopulerkan istilah "Non-Governmental Organization" melalui Pasal 71 Piagam PBB (1945). Menurut rujukan ini, NGO didefinisikan sebagai: "Setiap kelompok warga negara sukarela yang bersifat nirlaba, yang diorganisir di tingkat lokal, nasional, atau internasional untuk menangani isu-isu demi kepentingan publik" (United Nations, 1945).

Bank Dunia mendefinisikan NGO sebagai: "Organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mempromosikan kepentingan masyarakat miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan sosial dasar, atau melakukan pengembangan masyarakat." Secara lebih rinci Bank Dunia membagi NGO menjadi dua kategori besar; Operational NGOs yang fokus pada desain dan implementasi proyek pembangunan (pemberian layanan) dan *Advocacy* NGOs yang fokus pada pembelaan atau promosi tujuan tertentu dan memengaruhi kebijakan (*Operations Evaluation Department Lessons and Practices No. 18*

*Non-Governmental Organizations and Civil Society Engagement in World Bank Supported Projects: Lessons from OED Evaluations*, 2002; World Bank, 1996).

Secara teoritis, NGO sering menjalankan fungsi sebagai "pengisi celah" (*gap-fillers*) di wilayah di mana dukungan pemerintah terbatas atau kewajiban hukum internasional belum diratifikasi sepenuhnya. Dalam berbagai kasus darurat migrasi, efektivitas NGO sangat bergantung pada kemampuan mereka menyeimbangkan peran antara penyedia bantuan medis-logistik dengan fungsi advokasi hak asasi manusia untuk mencegah potensi bahaya lebih lanjut (*primum non nocere*) (Vu & Satzewich, 2016).

Teori sistem migrasi internasional menempatkan NGO sebagai perantara tingkat "meso" yang menjembatani kekuatan makro negara dengan keputusan mikro tingkat keluarga. NGO dalam peran ini tidak hanya memfasilitasi pergerakan fisik, tetapi juga terlibat dalam proses "pembentukan biografi" (*biography formation*), di mana mereka membantu pengungsi menyusun identitas mereka agar sesuai dengan kategori seleksi yang ditetapkan oleh negara-negara penerima (Vu & Satzewich, 2016).

Tata kelola pengungsi di negara transit, dalam hal ini Indonesia, secara *defacto* terjadi perbedaan antara kepentingan kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan isu kemanusiaan global. Indonesia menerapkan model "toleransi pragmatis" dengan melimpahkan penentuan status pengungsi kepada UNHCR dan operasional layanan harian kepada kerjasama antara pemerintah dan NGO internasional. Penggunaan fasilitas pulau terpencil seperti Pulau Galang secara teoritis berfungsi sebagai bentuk penahanan (*containment*) yang membatasi mobilitas sosial pengungsi namun tetap memberikan perlindungan fisik di bawah pengawasan komunitas internasional; dekat dengan Singapura dan Malaysia (Cribb et al., 2022; Fandik, 2013; Missbach, 2013; Rizka & Prabaningtyas, 2019).

Dalam sejarah kemanusiaan, keterlibatan NGO termasuk di *Faith-Based Organizations* (FBO) sering kali menjadi jembatan awal bagi respons internasional sebelum mekanisme formal negara terbentuk sepenuhnya (Vu & Satzewich, 2016).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif-historis. Data dikumpulkan dari dokumen laporan organisasi yang terlibat, buku-buku terkait pengungsi Vietnam di Pulau Galang dan jurnal bereputasi internasional, serta dokumen primer program seperti *Cultural Orientation Resource Manual* (1983) dan edisi *Galang spesial jurnal Passage* (1987). Analisis dilakukan dengan menyintesis temuan

mengenai peran NGO dalam tiga pilar: perlindungan kemanusiaan, layanan kesehatan, dan transformasi edukasi bagi pemukiman kembali (*resettlement*).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Eksodus massal masyarakat Vietnam, dan juga negara sekitarnya seperti Kamboja dan Laos pada akhir 1970-an, merupakan konsekuensi langsung dari rentetan peperangan yang berkepanjangan di semenanjung Indochina yang melibatkan kekuatan global (Adam, 2012). Gelombang pertama pengungsi Vietnam mendarat di perairan Indonesia pada tanggal 22 Mei 1975 di Pulau Laut, Kepulauan Natuna Utara, dengan jumlah awal hanya sekitar 75 orang (Hoedemaekers, 1979). Namun, seiring waktu, intensitas kedatangan meningkat secara eksponensial di pulau lainnya di Kepulauan Riau; Pulau Kuku, Pulau Bintan, dan pulau lainnya.

##### **Keterlibatan NGO Katolik di Gelombang Pertama Pengungsi**

Lembaga berbasis agama memperkuat sinergi kemanusiaan di Galang dengan membawa dimensi advokasi dan manajemen kasus yang spesifik. Keuskupan Pangkalpinang secara geografis bertanggung jawab atas wilayah Kepulauan Riau. Di bawah kepemimpinan Mgr. Rolf Reichenbach, SS.CC (Administrator Apostolik periode 1975–1987), Gereja lokal menjadi jembatan diplomasi kemanusiaan terutama pada gelombang pertama pengungsi sebelum pemerintah dan PBB secara menyeluruh terlibat.

Dalam “Boat People di Indonesia” yaitu Laporan internal Gereja Katolik yang dipersiapkan untuk diserahkan kepada sidang MAWI (1979), tercatat pada Juni 1975 pengungsi pertama masuk Tanjungpinang, kemudian pada Februari 1976 beberapa kapal pengungsi Vietnam masuk lagi di Anambas, kemudian dibawa ke Tanjungpinang (Hoedemaekers, 1979). Bersama pengungsi pertama jumlah mereka sekitar 100 orang, dan semua beragama Katolik dan ditangani seluruhnya oleh Gereja Katolik Paroki Tanjungpinang melalui Yayasan Cipta Karya (YCK). Pada akhir tahun 1976 UNHCR mulai membantu pengungsi dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah (General Assembly UN, 1981). Hingga tahun 1978 masih ada gelombang pengungsi Vietnam, tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu besar, berkisar 3000 orang. Namun, mulai Maret 1979 perahu-perahu pengungsi Vietnam semakin banyak yang berlabuh di Bintan. Bahkan pada Juni 1979, di Anambas dibanjiri perahu pengungsi hingga berjumlah kurang lebih 45.000 orang pada Agustus 1979. Pada bulan Agustus 1979 juga organisasi-organisasi bantuan luar negeri mulai beroperasi, diantaranya Wolrdvision (*Seesweap*), Ile de Lumiare, Medicins sans Frontiere. Pulau Galang yang sudah disiapkan sejak September 1979, sudah mulai menerima pengungsi pada bulan

Oktober 1979, terutama dari kamp-kamp Tarempa dan Letung, ditambah pengungsi baru (Tran, 2012). Worldvision membangun gudang dan sarana air bersih di Air Raya dan Kuku. Beberapa NGO mulai masuk diantaranya *Save the Children Federation (SCF)*, *Care*, *Port de Lumiere*, *Lysekil*, *Flora*. Sementara itu terkait pendidikan di kamp-kamp Anambas dan Air Raya dilakukan oleh YCK dan UNHCR. Layanan *Banking Service* dan *Mailing Service* di Pulau Galang ditangani oleh YCK (General Assembly UN, 1981; Hoedemaekers, 1979; Nguyen, 1992).

Pada November 1980, didirikan *Jesuit Refugee Service (JRS)* Pater Pedro Arrupe SJ, Pemimpin Umum Serikat Yesus sebagai tanggapan atas krisis manusia perahu Vietnam. JRS mengirim pelayanan diberbagai kamp pengungsian di Asia Tenggara, termasuk di Pulau Galang (JRS, 2005; “Sejarah - JRS Indonesia,” 1 B.C.E.). Sejak kamp Pulau Galang dibuka, JRS telah menempatkan Gildo Dominici SJ untuk membantu pelayanan spiritual pengungsi dan pendampingan anak-anak pengungsi yang terpisah dari orang tua (*unaccompanied minor*). JRS juga mendampingi berbagai unit kegiatan untuk para pengungsi, diantaranya kelompok remaja *Thiếu Nhi Thánh Thể (TNNT)*, majalah dwibulanan “Tu Do”, *Legio Mariae*, dan lain-lain. Setelah Gildo Dominici SJ pindah ke kamp pengungsi Filipina, JRS menempatkan Padmosaputra SJ dan Sugondo SJ untuk membantu pelayanan para pengungsi (Phú, 2023; Suharyanto, 2026; Bao, 2003).

Terdapat pembagian tugas yang spesifik dalam pengelolaan pelatihan di Pulau Galang. Berbeda dengan kamp pengungsi Vietnam di Bataan (Filipina) di mana *International Catholic Migration Commission (ICMC)* memimpin program pendidikan secara menyeluruh, di Pulau Galang program ini dijalankan melalui konsorsium.

### **Pembentukan Konsorsium dan Respon Awal NGO**

Bermula ketika aliansi *Save the Children Federation (SCF)* dari berbagai negara memberikan kontribusi awal sebesar \$600.000 untuk merespon kondisi pengungsi di Kepulauan Anambas yang sangat buruk. Pada Agustus 1979, SCF mencapai kesepakatan dengan *The Experiment in International Living (EIL)* untuk membentuk konsorsium yang mengelola program bahasa (ESL) dan orientasi budaya (CO). Program intensif ini secara resmi dimulai di Galang pada Mei 1981, menekankan pada kesiapan pengungsi untuk hidup mandiri di negara ketiga.

Program *Intensive English as a Second Language (IESL)*, *Cultural Orientation (CO)*, dan *Pre-employment Training (PET)* di Pulau Galang secara resmi dijalankan oleh *Consortium of Save the Children Federation* dan *The Experiment in International Living*. Program ini

bertujuan menyiapkan pengungsi agar mandiri secara ekonomi setelah tiba di negara tujuan (Center for Applied Linguistics, 1982, 1987).

NGO di Galang mengembangkan model pendidikan yang sangat terstruktur melalui *Overseas Refugee Training Program* (ORTP). Kurikulum ini mencakup tiga komponen utama. Pertama, *English as a Second Language* (ESL) yakni emberikan kemampuan komunikasi dasar untuk bertahan hidup. Kedua, *Cultural Orientation* (CO), dengan memberikan informasi realistis tentang kehidupan di AS, termasuk sistem hukum dan norma sosial. Ketiga, *Work Orientation* (WO), sejak 1983, komponen ini diperkuat dengan simulasi tempat kerja bernama "PETCO" (*Pre-Employment Training Corporation*) (Center for Applied Linguistics, 1982, 1987). Dalam simulasi ini, pengungsi bertindak sebagai karyawan dan guru sebagai pengawas, untuk membiasakan mereka dengan budaya kerja Barat seperti ketepatan waktu, slip gaji, dan prosedur keamanan kerja. Hingga tahun 1987, program yang dikelola NGO ini telah meluluskan lebih dari 65.000 pengungsi di Galang, menjadikannya salah satu pusat pemrosesan paling produktif dalam sejarah UNHCR (General Assembly UN, 1981).

Layanan kesehatan dikelola secara sentral oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dengan dukungan bantuan internasional. NGO seperti Médecins Sans Frontières (MSF) dan World Vision memberikan bantuan medis kritis, termasuk pengoperasian kapal rumah sakit *Seasweep* untuk menyelamatkan pengungsi di laut. SCF juga menjalankan program nutrisi khusus anak di bawah usia lima tahun melalui produksi paket makanan tambahan di dalam kamp Galang (Nguyen, 1992; Tran, 2012).

Secara resmi Palang Merah Indonesia (PMI) ditunjuk pemerintah pada September 1979 menjadi operational partner UNHCR dan diharapkan mengkoordinir semua usaha bantuan. Namun, pada saat itu PMI mengalami banyak kesulitan di periode awal karena kurangnya pengalaman lapangan bekerja dengan pengungsi yang besar dan organisasi internasional. PMI mendapat dukungan bantuan *adviser* dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC) sehingga berbagai hambatan dan kesulitan akhirnya dapat diatasi (Hoedemaekers, 1979; Son Binh Nguyen, 1992).

Beberapa NGO lainnya yang turut membantu penanganan pengungsi di Pulau Galang adalah L'Île de Lumière sebuah kapal sekaligus rumah sakit; prakarsa para intelektual Perancis dan Médecins Sans Frontières. Kehadiran kapal ini dipicu adanya laporan pemberitaan kapal Hai Hong pada November 1978 yang menggambarkan parahnya kondisi pengungsi Vietnam di dalam kapal (Center for Applied Linguistics, 1987; Cribb et al., 2022; Son Binh Nguyen, 1992). Médecins Sans Frontières juga mendirikan rumah sakit di kamp Pulau Kuku, lengkap dengan dokter dan perawat mandiri. Kapal Lysekil Norwegia turut membantu transportasi

pengungsi dari Anambas ke Pulau Galang (Hoedemaekers, 1979). NGO dari Jerman yang serupa yaitu kapal sekaligus rumah sakit adalah Cap Anamur atau *Pot de Lumière*. Kapal Cap Anamur terlibat dalam evakuasi dan pemrosesan pengungsi sebelum tiba di Galang. Kapal pertama, Cap Anamur I, beroperasi Juli 1979–Mei 1982 dan menyelamatkan 9.507 pengungsi laut. Kapal kedua, Cap Anamur II, beroperasi Maret–Juni 1986 dan menyelamatkan 888 pengungsi. Total, Cap Anamur menyelamatkan lebih dari 10.000 orang di Laut Cina Selatan (Huán, 2000; Archive, 2016).

### **Comprehensive Plan of Action (CPA) 1989**

Pada bulan Juni 1989, sebuah konferensi internasional di Jenewa menghasilkan *Comprehensive Plan of Action* (CPA). Kebijakan ini secara radikal mengubah cara status pengungsi ditentukan. Sebelumnya, semua orang yang melarikan diri dari Vietnam secara otomatis dianggap sebagai pengungsi politik. Namun, di bawah CPA, diperkenalkan sistem skrining (*filtering system*) yang sangat ketat (Betts, 2006; Davies, 2008; Robinson, 2004).

Mereka yang lolos dikategorikan sebagai "*screened-in*" dan berhak mendapatkan penempatan di negara ketiga. Sebaliknya, mereka yang dianggap melarikan diri hanya karena alasan ekonomi dikategorikan sebagai "*screened-out*" dan harus dipulangkan ke Vietnam melalui program repatriasi sukarela atau paksa. Implementasi CPA memicu gelombang protes massal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kamp Galang. Para pengungsi yang ditolak statusnya merasa terjebak dalam limbo hukum. Ketidakpuasan ini memuncak pada tahun 1994 dalam bentuk kerusuhan besar, para pengungsi membakar barak-barak tempat tinggal mereka sendiri dan melakukan aksi mogok makan (Vietnamese Heritage Museum, 2000).

Pada sidang evaluasi CPA oleh UNHCR tahun 1996, perwakilan Tahta Suci, Silvano M Tomasi menyoroti kenyataan bahwa orang-orang yang masih berada di kamp Asia Tenggara, terutama perempuan dan anak-anak, masih membutuhkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Perlindungan tetap merupakan peran utama UNHCR. Tanggung jawab ini tidak berhenti dengan berakhirnya CPA (Tomasi, 1996).

Pada tanggal 2 September 1996, kelompok pengungsi terakhir resmi meninggalkan pulau tersebut, dan operasional kamp secara formal dihentikan (Adam, 2012).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Peran NGO di Pulau Galang (1979-1996) membuktikan bahwa krisis migrasi skala besar membutuhkan solusi multidimensional. NGO tidak hanya berfungsi sebagai penyedia logistik, tetapi juga memastikan adanya integrasi masa depan melalui program pendidikan intensif dan wawasan budaya kerja di negara tujuan penempatan. Kehadiran organisasi berbasis agama

seperti *Jesuit Refugee Service* (JRS) dan Yayasan Cipta Karya (YCK) memberikan dimensi perlindungan kemanusiaan yang kuat di tengah lingkungan yang didominasi kontrol militer. Pengalaman penanganan pengungsi di Galang kolaborasi NGO Lokal, Internasional, organisasi antar pemerintah, dan pemerintah, tetap menjadi referensi utama bagi kebijakan pengungsi kontemporer di Indonesia, menekankan pentingnya kemitraan multi-aktor dalam menghadapi krisis kemanusiaan global.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Stanislaus Kopong (78), mantan *Chief* Yayasan Cipta Karya (YCK) yang telah mengirikan salinan dokumen Laporan “*Boat People*” tahun 1979. Kepada RD Lucius Poya Hobamatan yang telah memberikan buku “Ketika Aku Orang Asing, Kamu Memberi Aku Tumpangan; Dari Vietnam ke Galang, dari Galang ke...”. Juga kepada RP Arsensius Guntur CS yang telah memberikan gambaran peran Kardinal Silvano Tomasi dalam mempersiapkan landasan karya migran bagi negara-negara tujuan penempatan.

## REFERENSI

- Adam, A. W. (2012). *Pulau Galang: Wajah humanisme Indonesia: Penanganan manusia perahu Vietnam 1979–1996*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Betts, A. (2006). *Comprehensive plans of action: Insights from CIREFCA and the Indochinese CPA* (No. 120).
- Bùi, V. P. (2023, November 8). Cha Dominici: Từ tro bụi lại về với bụi tro. *Tuần Việt Nam*. <https://vietnamweek.net/cha-dominici-tu-tro-bui-lai-ve-voi-bui-tro/>
- Center for Applied Linguistics. (1982). *Cultural orientation resource manual*.
- Center for Applied Linguistics. (1987). *Journal of refugee education: Special Galang issue*.
- Corfield, J. (2008). *The history of Vietnam*. Greenwood Press.
- Cribb, R., Twomey, C., & Wilson, S. (2022). *Detention camps in Asia: The conditions of confinement in modern Asian history*. Brill.
- Davies, S. E. (2008). Realistic yet humanitarian? The comprehensive plan of action and refugee policy in Southeast Asia. *International Relations of the Asia-Pacific*, 8(2), 191–217. <https://doi.org/10.1093/irap/lcm025>
- Fandik, M. (2013). Penampungan orang Vietnam di Pulau Galang 1975–1979. *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(1).

- Farhanditya, M. Y. (2024, February 23). Sejarah kepengungsian di Indonesia dan peran UNHCR. *UNHCR Indonesia*. <https://www.unhcr.org/id/berita/siaran-pers/sejarah-kepengungsian-di-indonesia-dan-peran-unhcr>
- Hoedemaekers, P. D. G. (1979). *Boat people di Indonesia*.
- Huán, N. H. (2000). The Cap Anamur II: The journey to Hamburg. *Vietnamese Heritage Museum*. <https://vietnamesemuseum.org/details/the-cap-anamur-ii-the-journey-to-hamburg/>
- Jenkins, R. E. (2014). *Resettling in place: A Vietnamese American Catholic experience*. United States Conference of Catholic Bishops.
- Jesuit Refugee Service Indonesia. (n.d.). Sejarah. <https://idn.jrs.net/id/tentang-jrs-indonesia/sejarah/>
- Jesuit Refugee Service. (2005). *Remembering 25 years Jesuit Refugee Service Asia Pacific 1980–2005*.
- Kompas. (2022, January 6). Latar belakang pecahnya Vietnam. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/06/080000079/latar-belakang-pecahnya-vietnam>
- Le, D. A. (2025). Vietnamese Catholic migrants and their missionary identity: Historical and contemporary contributions. *Journal of Identity and Migration Studies*, 19(1).
- Le, V. V. (1994). Vietnamese re-education camps: Do they violate both traditional and modern Vietnamese criminal law? *Arizona Journal of International and Comparative Law*. <http://hdl.handle.net/10150/659407>
- Missbach, A. (2013). Waiting on the islands of “stuckedness”: Managing asylum seekers in island detention camps in Indonesia. *ASEAS: Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.4232/10.ASEAS-6.2-4>
- Nguyen, S. B. (1992). *A social history of Camp Galang: An autobiographical account of life inside a Southeast Asian refugee camp* (Unpublished thesis). Carroll College.
- Presiden Republik Indonesia. (1979). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1979 tentang koordinasi penyelesaian masalah pengungsi Vietnam di Indonesia*.
- Purdey, J. (2020, April 27). A history of containment on Galang Island. *Inside Indonesia*. <https://www.insideindonesia.org/archive/articles/a-history-of-containment-on-galang-island>
- Putri, R. F. (2021). Indonesian immigration cooperation with international organizations for refugees. *Journal of Administration and International Development*, 1(2). <https://doi.org/10.52617/JAID.V1I1.291>

- Rizka, R. A., & Prabaningtyas, F. (2019). *Indonesia and the international refugee crisis: The politics of refugee protection*.
- Robinson, C. (2004). The comprehensive plan of action for Indochinese refugees, 1989–1997: Sharing the burden and passing the buck. *Journal of Refugee Studies*, 17(3).
- Słowiak, J. (2017). Role of religion and politico-religious organizations in South Vietnam during Ngo Dinh Diem period. *Nauki Społeczne*, 16(1), 109–124. <https://doi.org/10.26361/ZNTDSP.08.2017.16.06>
- Suharyanto, C. E. (2026). Majalah Tj Do: Narasi kebebasan di balik kawat berduri kamp pengungsian Galang. <https://www.mariadiatasperahu.my.id/2026/03/majalah-tu-do-narasi-kebebasan-di-balik.html>
- Tomasi, S. M. (1996). Refugees and the comprehensive plan of action. *Vatican*. [https://www.vatican.va/roman\\_curia/pontifical\\_councils/migrants/documents/rc\\_pc\\_mi-grants\\_doc\\_19960305\\_cpa\\_en.html](https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_mi-grants_doc_19960305_cpa_en.html)
- Tran, Q. T. (2012). Remembering the boat people exodus. *Journal of Vietnamese Studies*, 7(3), 80–121. <https://doi.org/10.1525/vs.2012.7.3.80>
- United Nations General Assembly. (1981). *Report of the United Nations High Commissioner for Refugees*. <https://www.refworld.org/reference/annualreport/unhcr/1981/en/42184>
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations and statute of the International Court of Justice*.
- Viet Bao. (2003, April 2). Cha Dominici: LM của trại tị nạn Galang đã từ trần. <https://vietbao.com/a60085/cha-dominici-lm-cua-trai-ti-nan-galang-da-tu-tran>
- Vietnam Refugee Archive. (2016, January 13). The Cap Anamur: Hop's journey. <https://vietnamese-archive.org/archive/2016/1/13/the-cap-anamur-hops-journey>
- Vietnamese Heritage Museum. (2000). Nguyen Van Tho. <https://vietnamesemuseum.org/details/nguyen-van-tho/>
- Vu, A. N., & Satzewich, V. (2016). The Vietnamese refugee crisis of the 1970s and 1980s: A retrospective view from NGO resettlement workers. *Refuge: Canada's Journal on Refugees*, 32(2).
- World Bank. (1996). *NGOs and the World Bank: Progress report on cooperation between the World Bank and NGOs*.
- World Bank. (2002). *Non-governmental organizations and civil society engagement in World Bank-supported projects: Lessons from OED evaluations*.